



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG HARI KUSUMO**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **681888**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.945.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 374 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **151.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S / MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N12M2 / SPD MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA AT11121B01 / SPD MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOTOR, HONDA REVO / SPD MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.121.941.878**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 3.218.441.878

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 3.218.441.878

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.